

Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (*United Liberalization Movement For West Papua*) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI

Drs. Berlian Helmy, M.Ec.

Direktur Pengkajian Politik Deputy Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI,
peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 59 Lemhannas RI

Abstrak

Menjadi tantangan berat bagi Indonesia ketika Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) tidak diakui oleh Vanuatu sebagai bagian dari NKRI karena dianggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan penjajahan atas wilayah Papua dan ras Melanesia Papua. Vanuatu secara gencar mengangkat isu Papua Merdeka ke dalam agenda global pada setiap pertemuan tahunan UNGA (*United Nation General Assembly*). Kebijakan Vanuatu ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang ancaman terhadap kedaulatan Indonesia terkait isu Papua dan membahas opsi-opsi kebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia untuk menangkal ancaman ini.

Kata Kunci : Papua, Papua Barat, Papua Merdeka, ULMWP (*United Liberalization Movement For West Papua*),



PENDAHULUAN

Gencarnya dukungan Vanuatu terhadap gerakan ULMWP dan gaung internasionalisasi isu Papua Merdeka (PM) seakan-akan menaburkan genderang perang yang menekan *counter-action* Indonesia dalam penegakan kedaulatan. Menjadi tantangan berat bagi Indonesia ketika Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) tidak diakui oleh Vanuatu sebagai bagian dari NKRI karena dianggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan penjajahan atas wilayah Papua dan ras Melanesia Papua. Hal ini dipertegas dengan diberlakukannya konstitusi ideologi Vanuatu yang mengakui bahwa selama belum dilahirkan ras Melanesia yang merdeka, maka belum sepenuhnya bangsa Melanesia akan merdeka.

Tendensi semakin memanas ketika Vanuatu secara gencar mengangkat isu Papua Merdeka ke dalam agenda global pada setiap pertemuan tahunan UNGA (*United*

Nation General Assembly). Hal ini semata-mata diarahkan untuk menarik perhatian dunia sehingga terbentuk opini global terhadap tindakan Pemerintah Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM berat yang mengekang hak kemerdekaan rakyat Papua untuk melepaskan diri dari NKRI. Tindakan secara sepihak Vanuatu ini telah memicu reaksi keras RI yang mau tidak mau menyikapinya secara tegas namun tepat dan hati-hati, dengan langkah-langkah strategis yang memberikan daya tangkal kuat terhadap internasionalisasi isu Papua.

Sudah bisa dipastikan yang menjadi target penangkalan isu Papua adalah ULMWP. Namun upaya penangkalan ini akan menjadi sia-sia bahkan tidak akan berpengaruh bagi kepentingan RI selama yang mendukungnya adalah sebuah entitas negara, seperti halnya Vanuatu yang terus ikut campur dalam urusan dalam negeri yang mengusik kedaulatan RI. Akan menjadi jauh lebih penting apabila Indonesia

menargetkan Vanuatu sebagai musuh utama yang harus dipatahkan mengingat negara ini adalah satu-satunya yang bersimpati terhadap gerakan ULMWP di Pasifik Selatan yang sebenarnya menjadi potensi ancaman yang berbahaya bagi keutuhan NKRI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apa yang menjadi langkah efektif untuk diambil oleh Pemerintah RI dalam mematahkan sikap Vanuatu yang pro Papua Merdeka tersebut, dan merubahnya menjadi pro NKRI ?”

PEMBAHASAN

Sikap Antipati dan Apatisme Vanuatu terhadap NKRI

Ideologi “Melanesia Merdeka” menjadi satu-satunya penyebab Vanuatu yang gencar memperjuangkan kemerdekaan Papua. Bagi Vanuatu, Papua tergolong ras Melanesia yang tidak dapat terpisahkan; untuk itu, perlu disatukan dalam wujud kesatuan Melanesia (*Melanesian Unity*). Ideologi ini tertuang dalam konstitusi hukum Vanuatu yang saat ini menjadi pegangan konstitusional. Paham ideologi ini diperkuat dengan kulturalisme Melanesia sebagai kepercayaan rasional dan cita-cita yang memperteguh soliditas ras di Pasifik Selatan yang terbebas dari kolonialisme. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa negara-negara ras Melanesia di Pasifik Selatan, termasuk Vanuatu merupakan negara-negara yang pernah terjajah.

Kesatuan Melanesia dapat dicapai dengan membentuk kemerdekaan ras yang dilandasi pada nasionalisme primordial karena homogenitas ras dalam kesatuan “Melanesia Raya” (Great Melanesian) yang disebut “*Melanesian sphere*”. Kesatuan Melanesia yang

Apa yang menjadi langkah efektif untuk diambil oleh Pemerintah RI dalam mematahkan sikap Vanuatu yang pro Papua Merdeka tersebut, dan merubahnya menjadi pro NKRI?

homogen menyebabkan Vanuatu berpandangan bahwa ras Melanesia adalah “ras bangsa” (*nation race*) yang mandiri berada dalam soliditas ras dalam lingkungan kawasan yang sama. Hal ini telah mendorong pengukuhan ideologi konstitusionalisme Melanesia menjadi doktrin dasar bagi Vanuatu untuk terus menanamkannya pada negara-negara tetangga sekitar yang tergolong memiliki kesamaan ras untuk saling mendukung ras Melanesia yang lain yang masih terjajah menuju kebebasan.

Kehendak mencapai kemerdekaan Melanesia, kesatuan Melanesia dan Melanesia yang mandiri lebih diperkuat agar lebih memudahkan pencapaian cita-cita Vanuatu yang ingin mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan ras Melanesia di kawasan. Ideologi ini mempunyai kekuatan dominan dan berpengaruh terhadap pergerakan Vanuatu untuk meraih emansipasi negara-negara sekawasan dengan ras yang sama untuk memperluas pemahaman ideologi yang berlandaskan hanya pada aspek sejarah kolonialisme, hak asasi, kedaulatan ras, soliditas ras, kesatuan ras menuju kemakmuran dan kesejahteraan.



Provokasi politik dilancarkan oleh Vanuatu untuk *streamlining* regionalisme berdasarkan rasisme sosialistik, dengan membentuk paradigma *Melanesian-led regionalism* dalam kerjasama sub-kawasan di Pasifik Selatan, yang dilancarkan melalui popularisasi kebangsaan sebagai metode. Dalam hal ini, Vanuatu ingin menjadikan dirinya sebagai “pusaran magnet ideologi” (*ideological magnate*) di Pasifik Selatan dengan memperalat ideologi kemerdekaan dan kesatuan Melanesia demi kepentingan politik. Disadari pula bahwa terjadi politisasi ideologi yang disengaja dilakukan oleh Vanuatu yang semata-mata hanya demi menjadikan Vanuatu sebagai pelopor kebangkitan ekonomi Melanesia. Politik mercusuar mulai dijalankan dalam keadaan sistem politik sosialisme diterapkan, dengan latar belakang kehendak Vanuatu yang sebenarnya ingin menjadikan negaranya sebagai mesin pertumbuhan kawasan. Paham inilah yang menciptakan *covert dual foreign policy*, di satu sisi Vanuatu memprioritaskan ideologisasi Melanesia demi kepentingan politik, sementara di sisi lain, terjadi politisasi ideologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.

Bagi Indonesia, sebuah tantangan yang cukup berat ketika harus berhadapan dengan stigma politisasi ideologi, regionalisme rasial, dan ideologisasi Melanesia yang sangat kuat dilancarkan oleh Vanuatu. Hal ini yang membuat Indonesia dan Vanuatu berada dalam posisi dan pandangan ideologis yang kontradiktif atas isu Papua. Indonesia adalah negara yang mayoritasnya ras Astronesia (di wilayah barat dan tengah Indonesia) sementara minoritasnya Melanesia (di wilayah timur

Indonesia). Tetap dengan dasar keteguhan persatuan dan kesatuan, menjadikan Papua bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI atas dasar perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Sementara Vanuatu yang seluruh masyarakatnya adalah ras Melanesia menganggap Papua adalah bagian dari satu kesatuan ras Melanesia yang tidak dapat terpisahkan dari ikatan emosionalnya dengan seluruh ras Melanesia di Pasifik Selatan. Hal inilah yang menyebabkan Vanuatu yang hingga saat ini masih bersikap apatis terhadap NKRI.

Isu Papua sebagai Komoditas Politik dalam Transaksi Kekuasaan di Vanuatu: Keberuntungan bagi ULMWP, Kebuntungan bagi RI

Bagi para politisi Vanuatu, uang adalah segala kekuasaan. Meraih kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan ditentukan pada faktor kekuatan uang. Segala bentuk transaksi politik dalam negeri Vanuatu tidak terlepas dari maraknya praktek politik uang untuk memenangkan kekuasaan. Mobilisasi dana yang menjadi sumber kekuasaan bergerak secara aktif dengan jual beli isu Papua sebagai komoditas politik yang paling laku dalam perdagangan politik selama kontestasi.

ULMWP memanfaatkan situasi tersebut dengan menjual isu kemerdekaan Papua kepada Vanuatu untuk diperdagangkan guna meraih kemenangan kekuasaan. Terjadilah dalam hal ini apa yang disebut hubungan mutualisme simbiosis yang dituangkan dalam konspirasi antara pemerintah, politisi parpol, dan parlemen Vanuatu dengan para aktivis ULMWP yang mengatur kemenangan politik dan dalam meraup dana. Artinya,

shared profits diterima kedua pihak dimana keuntungan dana tidak hanya dinikmati oleh pihak Vanuatu, akan tetapi juga oleh pihak ULMWP. Semakin gencar menyuarakan perjuangan Papua Merdeka, semakin menguntungkan bagi Vanuatu untuk kepentingan kekuasaan; sementara bagi ULMWP, merupakan keuntungan “uang” (*pitfall*) yang dimanfaatkan untuk mendanai pergerakannya agar eksis dengan terus menggaungkan isu Papua. Sejumlah dana hasil “jualan” isu Papua ini di-“parkir” dalam bentuk portofolio di luar negeri dengan kepemilikan pihak ketiga atas nama ULMWP sementara sisanya berbentuk kepemilikan aset negara oleh pemerintah Vanuatu.

Modus yang digunakan adalah dengan membentuk multi-level propaganda melalui pembentukan dan perluasan sel-sel wadah perjuangan ULMWP di berbagai negara yang mempunyai target untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari pemerintah maupun politisi setempat. Hal ini membuat jargon “Papua Merdeka Harga Mati” tidak akan pernah mati atau berhenti diperjuangkan oleh ULMWP karena disokong (*backed-up*) dengan kepentingan Vanuatu yang giat memperjuangkan kemerdekaan Papua demi mewujudkan ideologinya.

Pilihan Kebijakan yang *Unfavorable* untuk Membentuk Apriori terhadap Vanuatu

Reaksi tegas perlu diambil dengan tindakan retaliasi diplomatik dengan memperhitungkan untung rugi bagi Indonesia melalui beberapa pilihan kebijakan yang ditujukan guna menciptakan apriori internasional terhadap sikap Vanuatu yang selama ini jelas-jelas mendukung gerakan Papua merdeka. Beberapa pilihan kebijakan

dimaksud selama ini sudah pernah ada dalam benak wacana Pemerintah Indonesia, akan tetapi tetap mentok, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, seperti sebagai berikut:

Dasar keteguhan persatuan dan kesatuan, menjadikan Papua bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI atas dasar perjuangan bangsa dalam melawan penjajah

OPSI KEBIJAKAN	KELEBIHAN BAGI INDONESIA	KEKURANGAN BAGI INDONESIA
Normalisasi Hubungan	Menjaga <i>One State One Vote</i> dalam pencarian dukungan internasional	Menurunkan harkat dan martabat bangsa Indonesia
Status Quo	Tendensi pembentukan opini global yang menyalahkan sikap Vanuatu <i>inexcusable, against the norm</i> , atas intervensinya terhadap kedaulatan RI	Semakin meluasnya gerakan internasionalisasi isu Papua
Pemutusan Hubungan Diplomatik	Ketegasan sikap Indonesia dalam memperteguh norma hukum internasional yang ditunjukkan kepada dunia atas kedaulatan NKRI terhadap Papua yang sudah diakui secara internasional.	Membuka lebar peluang ULMWP untuk bermanuver dalam
<i>Checkbook Diplomacy</i>	Sedikit bisa menarik simpati meskipun memerlukan proses perubahan dalam jangka panjang	<i>Misuse</i> oleh pihak lawan yang menguntungkan namun merugikan bagi pihak Indonesia

PENUTUP

Kesimpulan

1. Nyata-nyata Vanuatu adalah musuh sebenarnya (*true enemy*) Indonesia, yang berpotensi menjadi ancaman besar bagi kedaulatan Indonesia.
2. Hubungan kedua negara dalam status *deadlock*, tidak akan pernah terjadi normalisasi hubungan diplomatik sepanjang sikap Vanuatu yang mengusik kedaulatan RI dengan masih mengangkat isu Papua.

Saran

Strategi mematahkan dukungan Vanuatu terhadap ULMWP atau untuk memutus jaringan simpatisan Vanuatu di Pasifik Selatan bersifat konkrit, *doable*, terukur, *business unusual* dan tidak normatif, dengan seyogianya mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat ekonomi Vanuatu menjadi bangkrut dan terpaksa harus bergantung pada Indonesia. Hal ini dilakukan dengan memborong mata uang Vatu (mata uang Vanuatu) oleh spekulan pasar Indonesia sehingga terjadi kelangkaan Vatu yang menyebabkan depresiasi kurs yang menggocang pasar valuta, dan memperkuat ekspansi mata uang Rupiah di pasar uang lokal.
2. Mengambil-alih seluruh kepemilikan saham aset negara Vanuatu oleh swasta Indonesia atau swasta pihak ketiga (konsorsium asing), dengan cara swasta Indonesia berkongsi dengan Cina untuk akuisisi. Sejauh ini ekonomi Vanuatu sangat bergantung pada Cina, dan Indonesia bisa memanfaatkan keberadaan Cina tersebut untuk *buy-back* aset. Dengan demikian,

- Vanuatu akan menjadi kehilangan aset miliknya.
3. *Hedging* semua saham *offshore* milik ULMWP yang ada di luar negeri, dengan cara:
 - Memblokir akun ULMWP oleh PPAK Indonesia atas nama pihak ketiga di bawah kerangka B to B melalui intervensi saham di negara yang tergolong *tax haven*.
 - Mengalihkan saham dengan penguasaan hak sekuritas di bursa internasional oleh spekulan saham Indonesia yang non-listed.
 - Menghapus saham milik ULMWP dan Vanuatu atas nama pihak ketiga dari list index saham di Wallstreet melalui *Dollar Cost Averaging* (DCA) oleh pihak *future trading* Indonesia
 - Menciptakan solvabilitas saham perusahaan Vanuatu dengan memperbesar *debt to equity ratio*-nya melalui pengalihan utang perusahaan Vanuatu ke pemerintah Vanuatu yang dilakukan dengan cara menguasai *hedging* oleh overseas BUMN Indonesia.
 4. Mengingat ketergantungan ekonomi Vanuatu yang sangat besar pada sektor kelautan, maka seluruh urat nadi ekonomi kelautan perlu dapat dikuasai oleh swasta Indonesia. Dengan demikian, kontrol ekonomi berada di tangan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan membangun unit-unit pengolahan berskala besar di berbagai tempat di Vanuatu dalam skema *foreign direct investment* oleh Indonesia.
 5. Jantung utama mobilitasasi Infrastruktur telekomunikasi, informasi dan transportasi dikuasai oleh Indonesia, dengan cara:
 - Membeli atau membangun basis media strategis yang kuat dengan mengambil-alih sarana infrastuktur media cetak dan elektronik milik lokal oleh konsorsium BUMN Indonesia dengan perusahaan FDI.
 - Menguasai *cyber-space* Vanuatu melalui pengiriman satelit Palapa-Ring di atas cakupan orbit Vanuatu dan pemilikan frekuensi untuk kontrol seluruh jaringan telekomunikasi Vanuatu oleh perusahaan patungan Indonesia dengan FDI.
 6. Ekspansi pengiriman tenaga kerja ahli Indonesia secara besar-besaran untuk menguasai sejumlah proyek pembangunan vital di Vanuatu yang dananya bersumber dari hasil akuisisi atau *buy-back* saham lokal oleh pihak swasta Indonesia.
 7. Membangun *contra-ideology* dengan membuat *single narrative* yang memuat konten yang mengaburkan identitas ras Melanesia melalui manipulasi data oleh *Indonesia Data Incorporated*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kirka - Predictive Analytical Paper, Survey on Vanuatu's Fact Finding, Canberra, 2017